



Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdpr)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr/)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/@BKSAPDPR)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemennegara lain, baik secara bilateralmalupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro.ksap@dpr.go.id

Delegasi BKSAP DPR RI Kunjungi IPB University untuk Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional

Bogor, 3 Februari 2026 – Delegasi dari Panitia Kerja Kecerdasan Buatan (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin oleh Bramantyo Suwondo (F-PD), melakukan kunjungan strategis ke IPB University di Bogor. Kunjungan ini disambut baik oleh Rektor IPB University beserta jajaran fakultas.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi BKSAP yang terdiri dari anggota lintas fraksi dan komisi, berdiskusi dengan Dekan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMMI) IPB University, serta ketua program studi dan dosen-dosen jurusan Kecerdasan Buatan. Diskusi tersebut membahas peluang dan tantangan implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, yang menjadi sektor strategis di tengah tantangan perubahan iklim global.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menggali lebih dalam bagaimana teknologi canggih seperti AI dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam sektor pangan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bramantyo Suwondo menegaskan, "Kecerdasan buatan telah menjadi isu utama dalam diplomasi internasional. Banyak forum internasional kini menempatkan AI sebagai agenda bersama dalam pembangunan global. *Inter-Parliamentary Union* (IPU) aktif mendorong pemanfaatan AI untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, sementara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah merumuskan Prinsip AI yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengembangan teknologi."

Beberapa anggota Panja AI BKSAP turut menyampaikan pandangan mereka. Amelia Anggraini (F-PNasDem) menyoroti prioritas penggunaan AI dalam digitalisasi UMKM, dengan menekankan pentingnya pemberdayaan petani dan nelayan. Adde Rosi Khoerunnisa (F-PG) menyampaikan tentang regulasi tata kelola AI di Indonesia. Menurutnya, meski Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai AI, sejumlah peraturan yang mendukung, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Etika AI dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, telah ada. Sementara itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika AI masih dalam tahap finalisasi.

Fathi (F-PD) menekankan pentingnya pengembangan riset kecerdasan buatan di sektor pangan, dengan DPR RI berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk anggaran riset. "Kita tidak boleh tertinggal dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan," tegasnya. Habib Aboe Bakar Alhabisy (F-PKS) menyoroti tantangan yang dihadapi petani dan nelayan dalam penerapan *smart farming*, meskipun kehadiran AI dapat membantu meningkatkan produktivitas pangan. Ini memerlukan peran aktif dari pemerintah dan perguruan tinggi.

Ravindra Airlangga (F-PG) melontarkan pertanyaan kritis: apakah AI membutuhkan regulasi tingkat undang-undang mengingat kerangka hukum yang sudah ada? Dia juga mengajukan pertanyaan praktis mengenai penerapan teknologi *Society 5.0* untuk petani skala kecil.

Arzeti Bilbina (F-PKB) menghubungkan ketahanan pangan dengan masalah *stunting*. "Strategi peningkatan pangan tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas nutrisi yang secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat," ujarnya. Nila Yani Hardiyanti (F-PDI Perjuangan) menyampaikan potensi AI dalam membantu nelayan membuat keputusan dalam berlayar, serta pentingnya AI yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Di akhir diskusi, Bramantyo Suwondo mengingatkan bahwa perubahan teknologi akan terus berkembang. "Dunia terus berubah. Tidak ada yang abadi selain perubahan. Kita tidak bisa menahan perubahan itu, namun yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan bijak. Dampak transformasi AI ke depan sangat besar, dan jika kita siapinya dengan baik, kita bisa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul," ujarnya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menggali lebih dalam bagaimana teknologi canggih seperti AI bisa dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam sektor pangan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. IPB University, sebagai lembaga pendidikan dan riset terkemuka, diharapkan terus berperan aktif dalam pengembangan solusi teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menyongsong masa depan yang lebih maju.

(*****)